

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
(BLT) TAHUN 2022 DI KOTA PADANG (STUDI KASUS KECAMATAN KOTO
TANGAH SEBAGAI PENERIMA PROGRAM BLT TERTINGGI)**

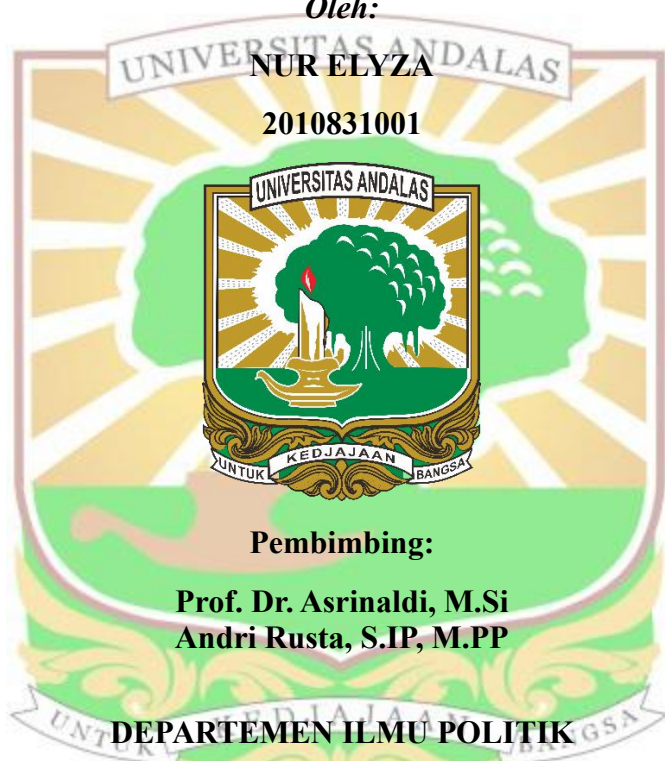
SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik*

Oleh:

NUR ELYZA

2010831001



Pembimbing:

**Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si
Andri Rusta, S.IP, M.PP**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2025

ABSTRAK

Program Bantuan Langsung Tunai atau yang dikenal BLT merupakan kebijakan dari pemerintah yang bermaksud untuk membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka ketika terjadi bencana atau kenaikan inflansi. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan program BLT di Kecamatan Koto Tangah yang memiliki penerima manfaat program BLT tertinggi di Kota Padang. Namun dalam implementasi program BLT di Kecamatan Koto Tangah masih terdapat beberapa kendala yang terjadi, diantaranya ketidaktepatan sasaran program, nepotisme politik yang terjadi di dalam proses pendataan, dan sumberdaya yang berkaitan dengan proses implementasi program BLT di Kecamatan Koto Tangah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus dan menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik untuk memilih informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis teori implementasi dari Donald Van Meter dan Carld Van Horn yang memiliki enam indikator implementasi kebijakan publik yang terdiri dari, standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya; hubungan komunikasi antar organisasi; karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik; serta disposisi atau sikap para imlementor. Berdasarkan indikator tersebut, proses implementasi program BLT di Kecamatan Koto Tangah masih rentan ditunggangi nepotisme dan permainan politik yang dapat merugikan masyarakat. Sumberdaya dalam proses implementasi program BLT di Kecamatan Koto Tangah masih terbilang belum memadai, dari segi sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia. Meskipun sudah memiliki persyaratan dan kriteria yang telah ditentukan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut yang membuat terjadinya kecemburuan sosial terjadi di tengah masyarakat penerima program dan non penerima program. Oleh karena itu, para implementor lebih memasifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar hal-hal seperti ini bisa diatasi. Agar program BLT bisa lebih efektif dan efisien di salurkan, dan jatuh ketangan yang tepat dan membutuhkan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Bantuan Langsung Tunai.

ABSTRACT

The Direct Cash Assistance (BLT) program is a government policy designed to help low-income communities meet their basic needs during disasters or periods of high inflation. This research examines the implementation of the BLT program policy in Koto Tangah Sub-district, which has the highest number of BLT beneficiaries in Padang City. However, the program's implementation in Koto Tangah Sub-district still faces several obstacles, including inaccurate beneficiary targeting, political nepotism during the data collection process, and resource limitations related to the program's implementation. This study uses a qualitative method with a case study approach and employs purposive sampling to select informants. We apply Donald Van Meter and Carl Van Horn's theory of implementation, which outlines six indicators of public policy implementation: policy standards and objectives; resources; inter-organizational communication relationships; characteristics of implementing agents; social, economic, and political conditions; and the disposition or attitude of the implementers. Based on these indicators, the BLT program's implementation process in Koto Tangah Sub-district remains susceptible to nepotism and political maneuvering, which can disadvantage the community. Resources for the BLT program's implementation in Koto Tangah Sub-district are still considered inadequate, both in terms of human and non-human resources. Despite having established requirements and criteria, many community members remain unaware of them, leading to social jealousy between program beneficiaries and non-beneficiaries. Therefore, implementers should intensify socialization and education efforts among the community to address these issues, ensuring the BLT program can be distributed more effectively and efficiently to those who truly need it.

Keywords: Implementation, Policy, Direct Cash Assistance.